



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM  
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644  
WEBSITE: [www.bsip.pertanian.go.id](http://www.bsip.pertanian.go.id) e-mail: [bsip@pertanian.go.id](mailto:bsip@pertanian.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan standardisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi Badan Publik Secara efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan komunikasi kepada pemohon informasi perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.**

**KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
  - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
  - e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
  - g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing UK/UPT.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN,



RADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN**  
**STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**NOMOR 36.1/Kpts/OT.050/H/01/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN**  
**STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

**PPID PELAKSANA UNIT KERJA**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

NO.	UNIT KERJA	PPID PELAKSANA UK
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
2.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
3.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
4.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

**PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA UPT
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
5.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

6.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
7.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
8.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia
10.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
11.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
14.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
18.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
21.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
23.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
24.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi
25.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
26.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil

27.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau
37.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali
44.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat



47.	Balai Penerapan Instrumen Kalimantan Tengah	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
48.	Balai Penerapan Instrumen Kalimantan Selatan	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan
49.	Balai Penerapan Instrumen Kalimantan Timur	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Kalimantan Timur
50.	Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Utara	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Utara
51.	Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Tengah	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah
52.	Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Selatan	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
53.	Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Tenggara	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
54.	Balai Penerapan Instrumen Gorontalo	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Gorontalo
55.	Balai Penerapan Instrumen Sulawesi Barat	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Barat
56.	Balai Penerapan Instrumen Maluku	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Maluku
57.	Balai Penerapan Instrumen Maluku Utara	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Maluku Utara
58.	Balai Penerapan Instrumen Papua Barat	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Papua Barat
59.	Balai Penerapan Instrumen Papua	Standar Pertanian	Kepala Balai Penerapan Instrumen Pertanian Papua



KEPALA BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY